



# LAPORAN KAJIAN STUDI PENCEGAHAN KORUPSI DI PERTAMBANGAN, DAN MINYAK DAN GAS BUMI

Konsultan :

Ahmad Alamsyah Saragih, Giri Ahmad Taufik, M Faiz Aziz,  
Dikdik Rahmat Mulyana, dan Mario Angkawidjadja

Surabaya, 6 Oktober 2022





# LATAR BELAKANG

- Kebutuhan akan pemetaan (cerita sukses, dan tantangan yang ada) terkait dengan inisiatif pencegahan korupsi yang ada saat ini di sektor industri ekstraktif;
- Kebutuhan untuk memberikan rekomendasi arah inisiatif pencegahan korupsi yang akan datang.
  - Rekomendasi inisiatif untuk Aksi PK 2023 – 2024; dan
  - Rekomendasi bentuk dukungan EITI di dalam pencegahan anti korupsi di sektor industri ekstraktif, yang terhubung dengan rencana aksi PK.

# TUJUAN KAJIAN

1

Melakukan pemetaan (cerita sukses dan tantangan) terhadap inisiatif pencegahan korupsi yang ada saat ini.

2

Menyusun rekomendasi kepada Timnas PK untuk RAN PK 2023 – 2024

3

Menyusun rekomendasi kepada EITI Indonesia untuk memberikan dukungan yang sinergis terhadap Aksi PK 2023 - 2024.

# METODE DAN BATASAN KAJIAN

Kajian ini merupakan kajian yang bersifat kualitatif, dengan melaksanakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara

Kajian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut :

- ❑ Kajian ini membatasi diskusi secara spesifik terhadap inisiatif pencegahan korupsi di sektor industri ekstraktif;
- ❑ Kajian ini menggunakan framework EITI Principles dan Requirement sebagai basis analisisnya, dan untuk kontribusi EITI terhadap inisiatif pencegahan korupsi selanjutnya; dan
- ❑ Kajian ini melakukan verifikasi terbatas terhadap data/informasi yang ada.

# TIMELINE PENCEGAHAN KORUPSI

## Inpres 5/2004

### Fokus

- Kepatuhan LHKPN;
- Pengembangan Zona Anti Korupsi, terutama sektor-sektor layanan langsung;
- Penerapan Key Performance Indicators, bagi pejabat publik;
- Penegakan hukum yang kolaboratif antara aparat penegak hukum, melalui pertukaran informasi; dan
- Penguatan Monev terhadap perilaku koruptif di kantor-kantor pemerintahan.

### Lead sector

MenPan RB (pelaksana), & KPK (monev).

### Evaluasi

perlu mengintegrasikan dengan sistem perencanaan nasional

## Perpres 55/2012

### Fokus

- Mengintegrasikan Aksi PK dengan rencana pembangunan;
- Pengadopsian sistem informasi di bisnis proses lembaga-lembaga negara, terutama e-procurement;
- Penguatan sistem pengawasan bagi aparat pemerintah;
- Penerapan penilaian integritas di dalam mutasi, promosi jabatan;
- Peningkatan transparansi dan *ease of doing business*;

### Lead sector

Bappenas

### Evaluasi

Perlu memperhatikan keterlibatan

## Perpres 54/2018

### Fokus

- Perizinan dan tata niaga;
- Keuangan negara; dan
- Penegakan hukum dan reformasi birokrasi

### Lead Sector

Timnas PK (5 Lembaga/Institusi).

### Mekanisme

RAN PK per 2 (dua) tahun



# PENCEGAHAN KORUPSI

## UMUM

- Satu peta
- Beneficial Ownership
- Pengadopsian Sistem Informasi dalam Business Process

## SEKTOR TAMBANG

- Clear and Clean Inisiatif
- Transparansi Data MODI

## SEKTOR MIGAS

- SMAP ISO 37001
- Quantity Assurance SNI 9040
- Reformasi Tata Kelola Komoditas ISC Pertamina

# INISIATIF PENCEGAHAN KORUPSI UMUM

## SATUPETA

Keterbukaan data/informasi terkait dengan informasi registrasi IUP

### Kerentanan

- Akuntabilitas rendah karena, ketidakjelasan informasi soal IUP, beserta hak dan kewajibannya oleh publik.
- Tumpang tindih lahan

### Intervensi

- Mengintegrasikan data 85 data tematik dengan data konsesi pada arah lainnya.
- Integrasi satupeta di dalam proses pemberian izin konsesi lahan.

### Hasil

Peta tematik sektor industri ekstraktif di dalam satupeta

## BENEFICIAL OWNERSHIP

### Beneficial Ownership

Pembukaan data *beneficial ownership* untuk mencegah aktor dengan catatan buruk berpartisipasi di dalam kegiatan industri ekstraktif, termasuk potensi perbenturan kepentingan dalam pengambilan keputusan

### Kerentanan

- Potensi perbenturan kepentingan di dalam perizinan sektor pertambangan
- Masuknya aktor dengan catatan buruk di dalam industry pertambangan

### Intervensi

- Deklarasi pemilik manfaat yang didorong oleh Dirjen Minerba, melalui mekanisme attestation dan bagian dari persyaratan MoDI.

### Hasil

- Terkumpulnya data pemilik manfaat yang terpublish di MoDI
- Dibukanya data/informasi pemilik manfaat secara publik oleh

## PENGADOPSIAN SISTEM INFORMASI DI LAYANAN PERIZINAN, BUSINESS PROCESS, DAN PEMBAYARAN.

Penerapan sistem informasi di dalam proses bisnis/layanan perizinan sektor tambang, mulai dari pengawasan, sampai dengan pembayaran royalti

### Kerentanan

- Ketidaksinkronan data terkait dengan data produksi dan pembayaran royalty
- Pertemuan muka, rapat-rapat pembahasan yang memakan waktu lama, menimbulkan biaya yang tinggi

### Intervensi

- Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dari data produksi (jenis dan kualitas), dan pembayaran royalty

### Sistem Informasi

CIBD (Pengadaan Barang SKK), Layanan Berbasis IT (AFE, etc), E-RKB, SIMBARA, SIMTRADA, dan SIMPONI (integrasi MOMS, dan E-Payment, dan Lappran Hasil Verifikasi Surveyor), Migas Data Respository

### Hasil

Pengawasan yang lebih efisien dan mengurangi potensi mismatch data produksi dan



# INISIATIF PENCEGAHAN MINERBA

## CLEAR AND CLEAN

Penataan IUP untuk perizinan bermasalah, i.e., tidak melaksanakan kewajiban, tidak melakukan operasi, dan terdapat tumpang tindih lahan

### Kerentanan

tidak terdapat kontrol dari pemberian IUP yang dilakukan oleh kepala daerah, terdapat beberapa kasus suap.

### Intervensi

evaluasi IUP berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat Pasal 6 ayat (1) UU Pertambangan 2009 jo UU Pemda 2004  
Pembentukan korsub KPK

### Hasil

- Perusahaan terdapat di MODI (CNC) sebanyak 5875 perusahaan;
- kerentanan di dalam sistem pengawasan produksi dan pembayaran royalty.

## TRANSPARANSI DATA MODI

Outlet informasi publik dengan MODI, data produksi secara aggregate, dan daftar perusahaan beserta IUP

### Kerentanan

Tidak tersedianya data yang dapat diakses oleh publik

### Intervensi

Pengembangan outlet informasi terkait dengan data-data Minerba

### Hasil

Akses publik terhadap data dan informasi yang ada



# INISIATIF PENCEGAHAN MIGAS

## PENERAPAN SMAP (ISO 37001)

Menerapkan standar anti suap di organisasi perusahaan/pelayanan publik

### Kerentanan

Praktek gratifikasi, dan bentuk-bentuk perilaku korup lainnya, suap dan facilitation payment

### Intervensi

Menerapkan ISO 37001

### Hasil

Terbentuknya budaya anti suap dan integritas diorganisasi SKK Migas

## PENERAPAN QUANTITY ASSURANCE

Menerapkan sistem jaminan kuantitas dan akuntabilitas dan transparansi alir kuantitas (SNI 9040)

### Kerentanan

Ketidakadaan standar menyebabkan mismatch data produksi

### Intervensi

Penerapan SNI 9040:2021

### Hasil

Menjamin optimalisasi penerimaan negara

## INTEGRATED SUPPLY CHAIN PERTAMINA

Mengintegrasikan produksi nasional dan kebutuhan Migas Nasional

### Kerentanan

Tidak terkoordinasinya dan terencananya pengadaan Minyak dan Gas, yang menyebabkan inefisiensi pengadaan Minyak dan Gas

### Intervensi

Pembentukan ISC dan penghapusan/mereposisi trading arms Petral

### Hasil

Efisiensi di dalam pengadaan Minyak dan Gas oleh Pertamina.

# **CERITA SUKSES INISIATIF ANTI KORUPSI (HASIL, FAKTOR SUKSES, DAN *LESSON LEARNED*)**

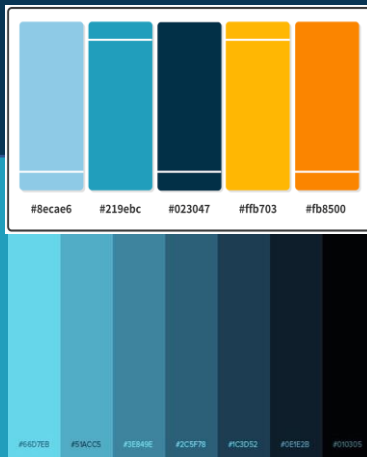
CNC

SMAP

ISC

Pengadopsian Sistem IT dalam Tata Kelola Industri  
Ekstraktif

# CLEAR AND CLEAN



## Hasil

- Pada tahun fiskal 2014, pemerintah berhasil mengumpulkan Rp. 100 miliar dari sewa tanah, dan 21,8 Trilliun dari tunggakan royalti (Laporan Korsub KPK, PWYP - KPK, 2017)
- Teridentifikasi kerentanan dalam sistem pelaporan dan pembayaran pendapatan negara, yang mendorong pengembangan-pengembangan reformasi di bidang pelaporan dan pembayaran pendapatan negara.
- Tertatanya perizinan dengan mekanisme clean and clear, dan adanya keberlanjutan pengawasan melalui mekanisme di dalam sistem MODI.

## Faktor sukses

- Kolaborasi antara KPK melalui Korsub SDA, KeMenESDM dan Kementerian Keuangan merupakan salah satu faktor utama di dalam kesuksesan program pemerintah ini.
- Kredibilitas KPK sebagai lembaga yang menjamin kepatuhan aktor negara, terutama Pemda.

## Lesson Learned

- Mekanisme dan cara di dalam melaksanakan evaluasi menjadi penting bagi negara-negara lain, yang memiliki struktur administrasi pemerintahan yang sejenis, kuatnya otonomi daerah dan iklim politik kompetitif terkait dengan dinamika politik lokal. Pelibatan institusi pemberantasan korupsi yang kredibel dan kuat seperti KPK

## SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP

### PENERAPAN SMAP, ISO 37001 SKK MIGAS

#### **Hasil**

Terbentuknya budaya dan sistem integritas di SKK Migas.

#### **Faktor Sukses**

Leadership yang berorientasi pada semangat anti korupsi, internalisasi 4 no (no luxury hospitality, no bribery, no kick back and no gift)

#### **Lesson Learned**

Internalisasi perilaku kerja dan budaya integritas perlu dikerangkakan di dalam sebuah sistem yang ajeg, hal ini diberikan melalui bisnis proses yang berkesesuaian dengan ISO 37001 dimana ekosistem pendukung telah terbentuk (standar, assessor, dan sistem registrasi telah terbentuk).

Berpeluang terciptanya budaya anti-korupsi di dalam ekosistem industri ekstraktif yang sistematik melalui ISO 37001, jika semua pemangku kepentingan (aktor) menerapkan SMAP.



# **INTEGRATED SUPPLY CHAIN**

## **Hasil**

Efisiensi di dalam pengadaan kebutuhan Migas Nasional, terintegrasinya antara kebutuhan Migas nasional dan produksi Migas nasional dalam kelembagaan yang terpadu

## **Faktor Sukses**

Dorongan publik terhadap transparansi dalam perencanaan dan kebutuhan dan pengadaan Migas Nasional yang terintegrasi dengan produksi nasional; dan  
Kolaborasi antara SKK Migas dan Pertamina sebagai penyerap produksi nasional (*off-taker*), dalam rangka ketahanan energi.

## **Lesson Learned**

Menghilangkan ketidaksinkronan dalam perencanaan pengadaan dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional, dengan mengintegrasikan produksi Migas dalam negeri dan kebutuhan

Model ini dapat diterapkan bagi negara-negara produksi yang berubah menjadi net importir Migas, dimana produksi nasional diintegrasikan dengan impor untuk menutupi kebutuhan nasional.

## PENGADOPSIAN SISTEM IT DALAM TATA KELOLA INDUSTRI EKSTRAKTIF

### PENGADOPSIAN IT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN SEKTOR MIGAS DAN MINERBA

#### Hasil

Proses administrasi layanan yang lebih efisien didukung oleh Service Level Agreement (SLA). Mengurangi interaksi langsung antara pelayan publik dengan pengguna layanan, mengurangi kerentanan dalam praktek pemberian *facilitation payment*

#### Faktor Sukses

Supervisi dan monitoring dari Setnas PK, dan dorongan secara konsisten di dalam Aksi PK;

Tekanan publik terkait dengan kebutuhan akan data dan informasi yang akurat dan handal

Secara internal komitmen dari kementerian dan unit layanan untuk perubahan.

#### Lesson Learned

Penerapan sistem IT memerlukan dorongan kuat dari publik, i.e., pengawasan desakan akan data yang realible;

Program penataan izin, i.e., program CNC memberikan dorongan kuat pengadopsian sistem informasi untuk memastikan kehandalan data dan integrasi data, sekaligus menapis kecurigaan dari publik terhadap tata kelola Migas



# TANTANGAN SELANJUTNYA

- Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong keberlanjutan capaian penataan perizinan yang ada;

- Eksistensi *Politically Exposed Persons* yang dominan kadang mempengaruhi implementasi inisiatif anti-korupsi di dalam sistem yang sudah terbangun;

- Perlunya dibangun ekosistem integritas oleh seluruh pelaku di dalam Industri ekstraktif;

- Belum tersedianya data-data migas (produksi, perusahaan (BO), dst) secara terintegrasi yang dapat diakses oleh publik; dan

- Perlunya dorongan pemanfaatan data BO untuk melakukan penapisan di aspek layanan perizinan, dan pengadaan barang.

# REKOMENDASI RAN PK 2023 – 2024 (To be discussed)

- Pembukaan kontrak/izin industri ekstraktif oleh Kementerian ESDM;
- Mengembangkan mekanisme supervisi dan koordinasi jangka panjang yang dilakukan oleh KPK kepada Kementerian ESDM, SKK Migas, Pertamina (ISC) dan Pemda dalam pemantauan inisiatif pencegahan anti korupsi;
- Penggunaan data BO untuk penapisan/filtering di dalam perizinan dan pengadaan barang di sektor industri ekstraktif :
  - Perumusan dan pembentukan peraturan Menteri ESDM mengenai pemanfaatan BO di dalam penapisan/filtering di dalam pelayanan perizinan dan pengadaan barang/jasa; dan
  - Pengembangan sistem operasional (*ready-use*) data BO bagi pelaksana dalam melakukan filterisasi.
- Dashboard informasi terkait produksi Migas dan mekanisme perdagangannya oleh Ditjen Migas/SKK Migas, SKK Migas, dan ISC Pertamina yang dapat diakses oleh Publik untuk mendorong akuntabilitas dalam perdagangan Migas. Data/informasi yang dimaksud : (i). Data Produksi (level aggregate. Lebel provinsi, dan level perusahaan); dan (ii). Pengelolaan /penyerapan MMKBN (Minyak Mentah dan/atau Kondesat Bagian Negara) oleh ISC Pertamina (Ekspor dan Impor).
- Penerapan SMAP kepada :
  - Unit pelaksana pelayanan pada tingkat daerah (Pemda) maupun pusat (ESDM);
  - Perusahaan Surveyor Pertambangan (LHV); dan
  - Perusahaan skala besar dalam rantai pasok pendukung kegiatan industri ekstraktif.



## **REKOMENDASI TERHADAP EITI INDONESIA (To be discussed)**

Memberikan dukungan/sosialisasi terhadap publik terkait dengan penggunaan data dan informasi yang telah dibuka oleh pemerintah dalam rangka mendorong iklim akuntabilitas di sektor Migas, secara tepat dan akurat.

Membentuk *sub-committee* anti-korupsi di dalam MSG untuk membahas dan mendiskusikan hal terkait dengan potensi kerentanan korupsi dan melakukan dukungan terhadap pelaksanaan inisiatif anti-korupsi oleh anggota MSG, yang bekerjasama secara erat dengan Setnas PK.